

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi ialah ideologi yang dianggap paling pas untuk beberapa negara, sebab demokrasi diperkirakan bisa menata serta mampu mengatasi permasalahan sosial dan politik, permasalahan tersebut melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, atau masyarakat dan negara. Demokrasi memiliki arti kekuasaan ada ditangan rakyat, dengan menjamin kebebasan berpendapat dan serta hak-hak rakyat secara adil. Menurut pendapat Abraham Lincoln bahwa, "*Government of the people, by the people, and for the people*", dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,¹ artinya rakyat mempunyai peranan penting di dalam sebuah pemerintahan baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pemilihan umum.

Pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia, karena pemilu merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan kekuasaan ada ditangan rakyat yang dimana para pemimpin dipilih melalui suara rakyat. Terdapat beberapa macam pemilihan di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Bupati, Walikota, dan Gubernur, Pemilihan Legislatif diadakan mengangkat Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan kepala Negara untuk memilih presiden.

Pengangkatan pejabat wilayah dan perwakilan pejabat wilayah akan terang-terangan dilaksanakan untuk kembalinya kekuasaan ke genggamannya masyarakat

¹ Rahmad Hendra, "*Demokrasi Dalam Pilkada*", Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 01, 2010. h. 14.

dengan arah perbuahan ialah membentuk sistem terbaru yang bertambah demokratis.

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Kemudian Pasal 56 ayat (2) menyatakan, pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan pada Pasal 59 ayat (2) menyatakan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah apabila memenuhi syarat perolehan suara sekurang-kurangnya 15% kursi dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Seorang Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi panutan, memahami persoalan masyarakatnya, bertanggung jawab atas amanat yang diberikan, kepala daerah juga diharapkan memiliki wawasan pengetahuan yang luas agar dapat menyelesaikan persoalan daerahnya dengan baik. Sehingga pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat menjadi keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kualitas calon kepala daerah yang terpilih sangat di

tentukan oleh pilihan masyarakat pada saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dalam penerapan sistem otonomi daerah telah mendorong terjadinya dinamika kepemimpinan politik di Kota Palembang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini memperlihatkan kenyataan bahwa setidaknya sejumlah pemimpin lokal telah membuktikan keberhasilan mengelola permasalahan kehidupan masyarakat yang terjadi pada daerahnya.

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km² yang dihuni 1.623.099 jiwa (Data tahun 2017) dengan kepadatan penduduk 4,052 per km² (Data tahun 2017).² Kota Palembang di pimpin oleh Walikota H. Harnojoyo, S.Sos. menjabat sebagai Walikota Palembang semenjak tahun 2015. Sebelumnya H. Harnojoyo, S.Sos. menjabat sebagai wakil Walikota Palembang. Pada tanggal 07 April 2013 Kota Palembang menyelenggarakan pemilihan walikota, yang diikuti oleh tiga pasang calon kandidat yang bersaing untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang, yakni;

Pasangan calon Walikota - Wakil Walikota Palembang Sarimuda-Nelly Rosdiana (nomor urut 3) unggul dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan mengumpulkan 316.923 suara. Peringkat kedua diduduki pasangan Romi Hertton-Harnojoyo (nomor urut 2) mengumpulkan sebanyak 316.915 suara atau hanya

² Kota Palembang, Sejarah Kota Palembang.
<https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah> . Diakses pada 30 juli 2019

terpaut delapan suara. Peringkat ketiga diduduki pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) dengan meraih 97.810 suara³.

Tabel 1.1

Daftar Paslon Pilkada Kota Palembang 2013

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung :
01	Mularis Djahri - Husni Thamrin	Partai Gerindra
02	Romi Hertton - Harnojoyo	PDI P, Partai Demokrat, PKS, PPP, dan PAN,
03	Sarimuda - Nelly Rosdiana	Partai Golkar, Partai Hanura, PKB

Disisi lain berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan adalah pasangan nomor urut satu memperoleh 97.809 suara, pasangan nomor urut dua memperoleh 316.919 suara, dan pasangan nomor urut tiga 316.896 suara.⁴ Dari keputusan ini Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pasangan nomor urut 2 Romi Hertton-Harnojoyo sebagai Walikota Palembang Periode 2013-2018. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Romi Hertton-Harnojoyo menjadi Walikota Palembang mendapatkan sorotan penuh dari masyarakat Palembang dan Komisi Pemberantasan Korupsi

³ Merdeka.com, *Pemenang Pilkada Palembang Hanya Unggul 8 Suara*.
<https://www.merdeka.com/politik/pemenang-pilkada-palembang-hanya-unggul-8-suara.html>
 Diakses pada 21 Juli 2019

⁴ Tribunnews.com, *MK putusan Pasangan Romi-Harno Memenangi Pilkada Kota Palembang*.
<https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/20/mk-putusan-pasangan-romi-harno-menangi-pilkada-kota-palembang>.
 Diakses Pada 21 Juli 2019

(KPK) karena adanya sesuatu yang dianggap aneh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Adanya sorotan dan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romi Herton ditahan karena dianggap melakukan aksi suap-menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk memenangkan pasangan Romi Herton-Harjono di pemilihan Walikota Palembang. Dengan ditahannya Romi Herton selaku Walikota Palembang membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang mengadakan sidang paripurna terbuka pada 6 Agustus 2015 dan telah memberhentikan Walikota Palembang Romi Herton terkait telah *inkracht*-nya keputusan pengadilan atas tindakannya diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.⁵

Berhentinya Romi Herton sebagai Walikota Palembang membuat Harjono akhirnya resmi dilantik sebagai Walikota Palembang dan menggantikan posisi Romi Herton yang tersandung kasus suap Pilkada 2013. Pelantikan berlangsung di Auditorium Bina Praja Pemrov Sumsel, Kamis 10 September 2015, oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Pelantikan ini berdasarkan SK Mendagri No.131.16-5050 Tahun 2015 pada 7 September 2015, berisi tentang pemberhentian Harjono sebagai Wakil Walikota Palembang dan diangkat sebagai Walikota Palembang dengan masa jabatan 2013-2018.⁶

⁵ Berita Satu, *Walikota Palembang Dilantik Hari Ini*.
<https://www.beritasatu.com/politik/305851-wali-kota-palembang-dilantik-hari-ini.html>.
Diakses Pada 21 Juli 2019

⁶ Liputan 6, *Harjono Resmi Jadi Walikota Palembang*.
https://www.liputan6.com/regional/read/2314871/harjono-resmi-jadi-walikota-palembang?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
Diakses Pada 21 Juli 2019

Dilantiknya Harnojoyo sebagai Walikota Palembang tentunya bukan pilihan terbaik untuk masyarakat Kota Palembang, karenanya masyarakat menginginkan paslon Sarimuda - Nelly Rosdiana untuk memimpin Kota Palembang. Masyarakat masih beranggapan Harnojoyo tidak pantas memimpin Kota Palembang dikarenakan menang hasil curang dan harus segera di berhentikan sebagai Walikota Palembang. Dengan citra Harnojoyo yang dinilai jelek dan tidak pantas memimpin Kota Palembang masyarakat Kota Palembang terus melakukan aksi-aksi agar aspirasinya di dengarkan oleh pemerintah agar diangkatnya paslon Sarimuda - Nelly Rosdiana untuk memimpin Kota Palembang.

Akan tetapi kemunculan Harnojoyo justru membawa fenomena baru dalam kancah kepemimpinan politik di Indonesia khususnya di Kota Palembang. Dari Walikota Palembang yang paling menonjol dari Kepemimpinan Politik Harnojoyo adalah slogan: "PALEMBANG EMAS" dengan menggunakan program sholat subuh berjamaah dan kegiatan gotong royong.

Pada awalnya Harnojoyo diragukan dan mempunyai nilai negatif oleh masyarakat karena terpilih dari hasil pemilihan yang dianggap curang yang dilakukan oleh pasangan terpilih Romi Herton - Harnojoyo, membuat citra Harnojoyo menjadi buruk dimasyarakat selaku pengganti Romi Herton sebagai Walikota Palembang., Tetapi perlahan dengan kepemimpinan politik yang dijalankan Harnojoyo telah membuat dia semakin dikenal dan mulai dicintai oleh rakyat Palembang. Hal inilah yang membuat fenomena kepemimpinan politik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang menjadi sangat unik dengan para pemimpin walikota sebelumnya. Yang dimana awalnya masyarakat terus-teruskan

melakukan aksi untuk mengganti Harnojoyo sebagai Walikota Palembang, menjadi mendukung dan mencintai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang dan memenangkan Harnojoyo di periode kedua. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti.” Citra Politik Harnojoyo Sebagai Walikota Palembang Periode 2013-2018 (Studi Persepsi Masyarakat Palembang Terhadap Citra Politik Harnojoyo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana citra politik Harnojoyo menurut pandangan Masyarakat Palembang ?
2. Apa dampak citra politik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang menurut Masyarakat Palembang periode 2013-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana citra politik Harnojoyo menurut masyarakat
2. Untuk mengetahui dampak citra politik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang menurut Masyarakat Palembang periode 2013-2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik. Dan diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa yang akan datang terkait masalah citra politik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk masyarakat, terutama untuk mendeskripsikan citra para politisi. Sehingga bisa menjadi acuan untuk memilih kandidat didalam pemilihan selanjutnya. Dan

diharapkan mampu menjadi acuan bagi para politisi untuk mengetahui bagaimana citra politik dalam kepemimpinan politik, sehingga bisa mempertahankan eksistensinya sebagai tokoh politik di Kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian dari Ali Sahab berjudul "*Realitas Citra Politik Tri Rismaharini*".⁷ Penelitian ini menjelaskan bagaimana citra politik Tri Rismaharini sebagai kepemimpinan politik Walikota Surabaya. Popularitas Risma sebagai Walikota Surabaya tumbuh sejak masa pencalonan Risma sebagai Walikota Surabaya. Kedekatan dengan media massa menjadi keuntungan sendiri bagi Risma. Sehingga apa pun yang dilakukan Risma selalu menjadi berita dan menjadi perbincangan di masyarakat Surabaya. Selanjutnya dalam kepemimpinan politik Risma adalah pribadi yang tegas dan pemberani dalam membangun kota Surabaya sehingga membuat citra Risma menjadi baik di masyarakat Surabaya maupun luar Surabaya.

Penelitian ini menerangkan bahwa Pencitraan politik bisa dilakukan oleh pejabat politik, Hal ini bisa terjadi karena media massa, termasuk media sosial menyampaikan pesan politik hasil dari rekonstruksi dari realitas yang sesungguhnya. Realitas yang disampaikan oleh media kadang merupakan realitas yang sudah dikemas atau realitas tangan kedua.

Realitas itu dibuat oleh wartawan, dan redaktur yang mengolah peristiwa politik menjadi berita politik, melalui proses penyaringan dan seleksi. Walaupun adakalanya media menampilkan realitas buatan yang tidak sesuai dengan realitas

⁷ Ali Sahab, 2017, *Realitas Citra Politik Tri Rismaharini*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30, No. 1.

yang sebenarnya, namun tetap banyak kalangan dalam masyarakat cenderung menerima begitu saja informasi dari media massa, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Itulah sebabnya banyak orang yang terkecoh dengan berita yang ditampilkan media massa.

Kedua, penelitian yang ditulis Aulia Umma Fad berjudul "*Analisis Citra Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim Melalui Rubrik Parlementaria Di Koran Tribun Kaltim*".⁸ Penelitian ini menggunakan teori citra dan teori Agenda Setting, penelitian ini menjelaskan tentang pemberitaan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim selama ini cukup buruk di mata masyarakat Kaltim. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi pada inisial HA, IM, AT, AS, AH, HO dan YT. Tujuh orang tersebut dianggap terlibat dalam perencanaan pembentukan rekening Ketua DPRD Kaltim terkait dana penunjang operasional dewan. Dan tentunya hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim.

Untuk membangkitkan citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepercayaan masyarakat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim terus melakukan upaya untuk menaikkan citra. Salah satunya dengan pemberitaan di Rubrik Parlementaria Koran Tribun Kaltim. Berbagai permasalahan yang terjadi pada beberapa oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti kasus korupsi, tindakan amoral, maupun yang menyalahi norma masyarakat menjadikan citra DPRD menjadi buruk. Hal ini tentunya bukanlah sebuah hal yang bagus dalam

⁸ Aulia Umma Fad, 2015, *Analisis Citra Politik Dprd Kaltim Melalui Rubrik Parlementaria Di Koran Tribun Kaltim*, Journal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No 1.

menjalankan sebuah sistem yang nantinya akan berhubungan dengan sistem pemerin tahan, dan kepercayaan masyarakat akan semakin menurun.

Ketiga, penelitian yang ditulis Zariah Sonessa berjudul "*Citra Kepemimpinan Bupati Kuansing Di Kecamatan Inuman*".⁹ Penelitian ini menjelaskan bahwa Bupati adalah orang yang sangat berpengaruh di suatu Kabupaten dalam membangun suatu wilayah, hal inilah yang menentukan berhasil tidaknya mengembangkan area. Kinerja dan cara menentukan keberhasilan kepemimpinan Bupati dalam masa jabatannya.

Keberhasilan pemerintah (Bupati) sangat memengaruhi citra yang dimilikinya, jika citra Bupati sudah tidak baik akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah tertentu di Kabupaten tersebut. Dalam masa jabatannya, Peraturan Kuansing menerapkan kebijakan pada awal pemerintahannya. Bupati Kuansing membuat kebijakan (PHK) karyawan di distrik Kuansing, kebijakan ini benar-benar membuat orang merasa sangat sedih. Orang menganggap bahwa Bupati hanya peduli dengan kepentingannya sendiri dan kelompoknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra kepemimpinan Bupati Kuansing distrik Inuman dibentuk oleh rangsangan, persepsi, kognisi, sikap, dan oleh gaya kepemimpinannya sendiri. Selain itu, citra kepemimpinan juga dibentuk oleh kesan, kepercayaan, dan sikap.

Keempat, penelitian yang ditulis Nia Zahara Adnani berjudul "*Jokowi Dan Pencitraan Politik Di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*".¹⁰ Penelitian ini

⁹ Zariah Sonessa, 2015, *Citra Kepemimpinan Bupati Kuansing Di Kecamatan Inuman*, Jurnal Fisip Vol.2 No. 2.

¹⁰ Nia Zahara Adnani, 2015, *Jokowi Dan Pencitraan Politik Di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

menjelaskan bahwa campur tangan media dalam menyajikan realitas suatu peristiwa politik akan memberi citra tertentu mengenai sebuah realitas politik.

Pembangunan citra politik aktor dan partai politik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan politiknya. Media massa sebagai sarana medium (parantara) penyampaian pesan memegang peranan yang sangat penting dalam komunikasi politik untuk pengembangan opini politik. Penilaian masyarakat bergantung pada bagaimana media massa memberikan nilai. Hal ini terjadi karena media massa dianggap sebagai alat ukur keberhasilan atau modernitas dan penerimaan publik. Jika dikaitkan dengan kemenangan Jokowi terutama di Yogyakarta tentu tidak terlepas dari campur tangan media massa, termasuk Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dalam memberikan citra positif terhadap Jokowi.

Dari penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis khususnya perspektif Fairclough yakni teks yang ditampilkan merupakan praktik wacana yang mencerminkan realitas (suatu peristiwa, tindakan dan keadaan yang terjadi) untuk menciptakan opini politik terhadap citra positif Jokowi yang tidak terlepas dari keterpihakan media terhadap salah satu calon.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Musdalifah Dachrud dan Aris Soleman yang berjudul "*Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri*".¹¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa Pencitraan politik merupakan salah satu cara yang sangat berpotensi untuk menggiring dan merayu rakyat terhadap pilihan politiknya. Permasalahannya adalah perilaku pencitraan

¹¹ Musdalifah Dachrud dan Aris Soleman, 2015, Potret Pemikiran, Vol.19, No. 2, Juli-Desember

yang dimunculkan seorang politisi (calon) belum tentu sama dengan karakter dan kepribadian yang sesungguhnya.

Mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) merupakan salah satu kajian dalam psikologi yang dapat memberikan pandangan dan pemahaman mengenai pencitraan politik. Sigmund Freud menjelaskan bahwa mekanisme pertahanan diri adalah upaya menunjukkan proses tidak sadar yang melindungi individu dari kecemasan melalui pemutar balikkan kenyataan.

Penelitian ini menggunakan Teori *image building*, yang menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (*attention filter*), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (*perceived message*), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra. Citra yang terbentuk berdasarkan informasi yang diterima melalui berbagai media, utamanya media massa cetak dan elektronik, yang bekerja membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Inri Inggrit Indrayani berjudul "*Media Dan Politik Citra Dalam Politik Indonesia Kontemporer*".¹² Penelitian ini menjelaskan tentang peran media dan citra politik dalam dinamika Politik Indonesia Kontemporer. Kontrol media terhadap opini publik memungkinkan media menjadi alat untuk penciptaan dan kontestasi gambar dalam politik. Esensi politik telah berkurang, di sisi lain citra kandidat menjadi isu strategis di luar program partai, visi dan misi kandidat.

¹² Inri Inggrit Indrayani, 2009, *Media Dan Politik Citra Dalam Politik Indonesia Kontemporer* Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 2.

Dalam citra politik, media mengubah kandidat menjadi produk kemasan yang disesuaikan dengan selera pasar alih-alih menempatkannya sebagai tokoh politik. Selain itu, media mewakili konstituen sebagai target pasar politik yang dapat dipengaruhi melalui hubungan masyarakat, strategi pemasaran dan iklan. Citra politik juga dimainkan oleh media di dalam berita, terutama yang terkait dengan kekuasaan resmi dan kapitalis. Kemenangan kandidat ditentukan oleh soft skill-nya dalam memainkan citra politik melalui media.

Beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang citra politik. Sedangkan perbedaan yaitu mengenai objek, dan tempat yang diteliti. Saya belum temui penelitian yang membahas tentang citra politik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018 (studi persepsi masyarakat Palembang terhadap citra politik Harnojoyo) dan dengan belum adanya penelitian ini dengan yang lain maka agar dapat bermanfaat dan memberi wawasan kepada mahasiswa maupun politisi yang ada dikota Palembang

F. Kerangka Teori

Citra merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide dan kesan yang di peroleh dari suatu object tertentu baik dirasakan secara langsung, melalui panca indra maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Citra sendiri dapat di artikan sebagai gambaran seseorang tentang politik yang mencakup pengaruh, wewenang, kekuasaan atau kekuatan, kerjasama konflik,

dan konsensus. Citra politik menurut Harrop (1990) dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu partai politik.¹³

Soemirat dan Ardiyanto, menyatakan bahwa citra adalah kesan, gambaran, diri publik terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Sedangkan Katz dalam Soemirat dan Ardiyanto mengatakan bahwa citra merupakan cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Jadi, citra itu sendiri perlu untuk diciptakan agar dapat bernilai positif secara keseluruhan.¹⁴

Menurut Teori citra dari Firmanzah yaitu,

1. Membutuhkan waktu yang relatif lama,
2. Membutuhkan konstitusi dari semua hal yang dilakukan partai politik bersangkutan, seperti platform partai, reputasi pemimpin partai, latar belakang partai, dan retorika partai,
3. Berupaya membangun kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan partai politik.¹⁵

Menurut Frank Jefkins dalam buku *Public Relations* citra adalah kesan yang benar, tidak selalu kesan yang baik atau lebih baik, dan tentu saja bukan kesan yang salah¹⁶. Citra diartikan sebagai "gambaran, kesan atau impresi yang tepat (*sesuai dengan kenyataan*) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personal atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan." Citra dapat dikatakan sebagai persepsi

¹³ Prof.Dr. Anwar Arifin. *Politik Pencitraan*, Graha Mulia, Yogyakarta: hlm.23

¹⁴ Dr. Poppy Ruliana, Dra., M.Si. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Rajawali

¹⁵ Roni Tabroni. *Komunikasi politik pada era multimedia*, Bandung, hlm 142

¹⁶ Frank Jefkins, *Public Relations*, (London: Palgrave Macmillan, 1983) h. 8

masyarakat dari adanya pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, sehingga sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra seseorang¹⁷.

Sedangkan menurut Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul *Pencitraan Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik)* menyebutkan bahwa citra politik merupakan suatu gambaran tentang objek yang terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. citra politik sendiri mencakup beberapa hal yaitu :

1. Seluruh pengetahuan politik seseorang (*kognitif*), baik benar maupun keliru
2. Semua preferensi (*afeksi*) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik
3. Semua pengharapan (*konasi*) yang di miliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu.
4. Citra politik selalu berubah-ubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan politik dan pengalaman politik seseorang.¹⁸

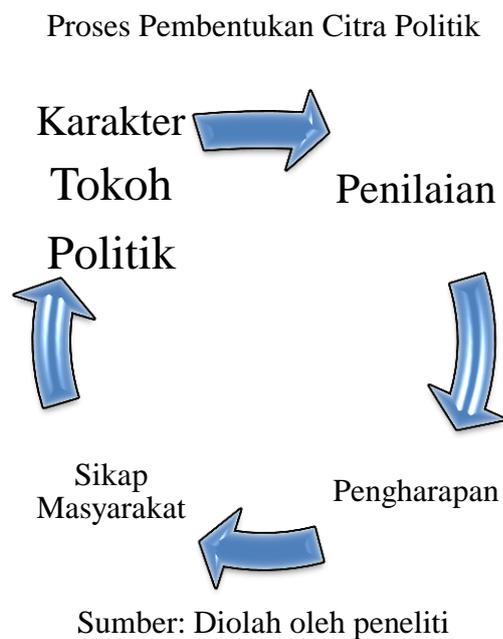
Dari penjabaran teori citra politik menurut Anwar Arifin peneliti menyederhankan bahwa citra politik terbentuk melalui pembelajaran dan pengalaman politik secara langsung, citra politik mencakup secara langsung seluruh pengetahuan politik tentang penilaian politik karakter suatu tokoh, baik benar maupun salah. Kemudian karakter politik tersebut membuat suatu kebijakan yang

¹⁷ Frank Jefkins, *Public Relations*, Edisi Kelima, Terjemahan Daniel Yadin (Jakarta: Erlangga, 2003), 93

¹⁸ Anwar Arifin, 2006, *Pencitraan Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*, (Jakarta : Pustaka Indonesia).h3

dinilai oleh masyarakat luas terhadap setiap tahap dari peristiwa politik yang terjadi. Pada akhirnya masyarakat mengharapkan kebijakan yang di buat oleh tokoh politik dapat di rasakan oleh masyarakat luas dan menimbulkan respon bagai masyarakat terhadap tokoh politik. sehingga citra politik itu sendiri bisa bertahan ataupun berubah tergantung dari pengetahuan dan pengalaman politik seseorang.

Adapun teori yang sudah di jabarkan di atas peneliti menggunakan teori dari Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul Pencitraan Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik), untuk menjawab masalah pada penelitian ini. menurutnya citra politik merupakan suatu gambaran tentang objek yang terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. adapun proses pembentukan citra politik menurut Anwar Arifin yang diolah oleh peneliti seperti gambar di bawah ini.



Dari gambar pola diatas peneliti menjabarkan dari setiap point-point yang di ungkapkan oleh Anwar Arifin, untuk

1. Berawal dari karakter tokoh politik yang mempunyai pengetahuan politik baik benar maupun keliru membuat suatu program untuk masyarakat.
2. Program tersebut dirasakan oleh masyarakat dan dinilai langsung apa yang dirasakan masyarakat
3. Dari program tersebut masyarakat menilai dan kemudian mempunyai harapan tentang apa yang terjadi dengan semua program yang dibuat
4. program yang dibuat dinilai dan diharapkan menimbulkan suatu sikap masyarakat, sikap tersebut bisa berubah-ubah tergantung dari pengetahuan dan pengalaman politik masyarakat tentang apa yang terjadi tergantung dari program yang dibikin oleh karakter tokoh politik.

Dari pengertian citra (*image*) yang di kemukakan dari beberapa tokoh di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa citra merupakan gambaran yang di sebarakan oleh objek untuk mendapatkan timbal balik berupa kepercayaan maupun citra yang baik oleh masyarakat luas terlebih lagi dalam suatu kepemimpinan.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau seting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata

atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.¹⁹

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁰ Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian dan mengangkat data yang ada di lapangan.

Penelitian ini akan diteliti dengan melakukan survei untuk menemukan pandangan masyarakat mengenai citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018, sehingga peneliti dapat menggambarkan citra yang dilakukan tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi pada citra politik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang 2013-2018. Kemudian peneliti mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang terjadi berdasarkan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi yang kemudian ditulis secara naratif.

2.Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti,²¹ sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini

¹⁹ Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariah, M.Pd, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta). h. 28

²⁰ Ibid, h. 25

²¹ Ibid, h. 103

adalah Masyarakat Kota Palembang yang akan dikelompokkan melalui pekerjaan yang ada di 7 Kecamatan Kota Palembang, masyarakat tersebut berjumlah 14 orang berinisial yaitu :

YZ bekerja sebagai pedagang di Kecamatan Jakabaring, AD bekerja sebagai pegawai honorer di Kecamatan Gandus, IL bekerja sebagai karyawan swasta di Kecamatan Ilir Barat I, HR bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Alang Alang Lebar, RK bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Ilir Barat I, ST sebagai ibu rumah tangga di Kecamatan Ilir Barat 1,

AR bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Ilir Timur 1, FR bekerja sebagai pedagang di Kecamatan Ilir Barat II, MZ bekerja sebagai karyawan swasta di Kecamatan Jakabaring, BD bekerja sebagai wiraswasta di Kecamatan Ilir Timur I, HB bekerja sebagai buruh harian lepas di Kecamatan Plaju, EK bekerja sebagai wiraswasta di Kecamatan Plaju, EL bekerja sebagai staf Kelurahan Siring Agung, UM bekerja sebagai Poll PP Pemerintahan Kota Palembang.

Kemudian data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, berita online, laporan-laporan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

²² Ibid, h. 103

A. Wawancara

Mc Millan dan Schumacher menjelaskan bahwa, wawancara yang mendalam adalah tanya - jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya. Dengan demikian wawancara mendalam yaitu adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi.²³

Peneliti menemui masyarakat yang akan dikelompokkan melalui pekerjaan seperti wiraswasta, buruh, dan karyawan di Kota Palembang yang merasakan langsung citra politik Harnojoyo. Ketika melakukan wawancara peneliti juga akan melakukan perekaman untuk mendokumentasikan pernyataan-pernyataan dari informan yang diwawancarai.

B. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁴ Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah berupa dokumen, gambar, serta data-data mengenai citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018.

²³ Ibid, h. 130-131

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Palembang yang berfokus pada fenomena citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018, dengan demikian yang menjadi perhatian ialah masyarakat dari golongan pekerjaan wiraswasta, buruh, dan karyawan di Kota Palembang.

5. Teknik Analisis Data

Hal terpenting dalam penelitian adalah menganalisis data. Setelah informasi data terkumpul selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut. Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap teknik analisis data yaitu :

A. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁶ Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet), h. 244

²⁶ Ibid, h. 247

B. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah merorganisasikan data dari hasil reduksi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dapat diartikan sebagai menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan mudah dipahami.

C. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau menyimpulkan data. Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Pada bagian ini peneliti hanya merangkumkan pokok-pokok yang menarik saja karena hal-hal yang muncul pada bagian ini secara eksploratif sudah muncul pada bagian isi.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memudahkan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis urutkan sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu, di Kota Palembang, yang akan diteliti yang mengambil beberapa sampel Fenomena citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018.

BAB III : Yaitu hasil dan pembahasan mengenai Fenomena citra politik Harnojoyo dalam persepsi masyarakat Palembang mengenai Harnojoyo sebagai Walikota Palembang periode 2013-2018.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran, berisikan tentang apa-apa yang telah didapatkan oleh penulis dari bab-bab sebelumnya yang terkait dengan masalah dalam skripsi, Saran, berisikan solusi dari permasalahan dalam skripsi ini.